

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Collective Action*

2.1.1 Definisi *Collective Action*

Collective action memiliki beragam definisi dalam literatur, namun secara umum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan individu sebagai bagian dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama atau mendorong perubahan sosial (van Zomeren, 2016), termasuk tindakan yang menuntut perubahan baik terhadap kelompoknya sendiri maupun terhadap kelompok lain yang memiliki posisi lebih kuat (van Zomeren, 2018). Definisi tersebut sejalan dengan pandangan Tilly (1981) yang memaknai *collective action* sebagai situasi ketika sekelompok individu mengerahkan sumber daya bersama untuk mencapai tujuan yang sama, serta pandangan Meinzen-Dick, Di Gregorio, dan McCarthy (2004) yang menekankan tindakan kelompok atau organisasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama para anggotanya. Selain berorientasi pada tujuan bersama, *collective action* juga melibatkan koordinasi antarindividu untuk mencapai hasil yang tidak dapat diwujudkan melalui tindakan individual, sebagaimana ditegaskan Flanagan dkk. (2006) bahwa tindakan kolektif berangkat dari kepentingan bersama yang mendorong individu mengkoordinasikan upayanya.

Collective action memiliki peran penting dalam mendukung *civic engagement*, karena menjadi inti dari masyarakat sipil yang dinamis (Jabbarli & Pfaff, 2023). Berbagai organisasi sosial, seperti partai politik, kelompok kepentingan, organisasi sukarela, dan komunitas keagamaan turut memperkuat partisipasi warga dan mendukung proses demokrasi (Putnam

dkk., 1994; Putnam & Campbell, 2010), sehingga masyarakat modern kerap digambarkan sebagai *social movement societies* yang ditandai tingginya aktivitas gerakan sosial dan protes (DiGrazia, 2014; Jenkins dkk., 2008; Meyer & Tarrow, 1998). *Collective action* berbeda dari partisipasi politik konvensional karena mencakup tindakan bersama seperti demonstrasi, pemogokan, hingga revolusi, yang umumnya muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan kelompok (*group grievances*) untuk mendorong perubahan sosial maupun politik (Ayanian dkk., 2025). Wright dkk. (1990) mengklasifikasikan *collective action* menjadi *normative action*, yaitu tindakan yang sesuai norma dan sistem sosial berlaku, dan *non-normative action*, yaitu tindakan yang melanggar atau berada di luar norma sosial tersebut.

Penelitian ini menggunakan konseptualisasi *collective action* dari Cervone dkk. (2023), yang dibangun dari integrasi *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA) oleh van Zomeren dkk. (2008) dan *dual pathway model of collective action* oleh Tausch dkk. (2011). Van Zomeren dkk. (2008) memandang *collective action* sebagai tindakan anggota kelompok untuk mencapai atau mempertahankan tujuan bersama, yang dipengaruhi oleh persepsi ketidakadilan, identitas sosial, dan efikasi kelompok, sementara Tausch dkk. (2011) menjelaskan keterlibatan tersebut terjadi melalui *emotional pathway* yang didorong respons emosional terhadap ketidakadilan dan *efficacy pathway* yang didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan kolektif mampu menghasilkan perubahan. Berdasarkan landasan tersebut, Cervone dkk. (2023) mengkonseptualisasikan *collective action* sebagai kesediaan individu untuk terlibat dalam tindakan bersama yang selaras dengan keyakinannya terhadap suatu isu sosial atau politik, yang tercermin melalui *Normative Collective Action* (cara-cara sesuai norma sosial dan hukum) dan *Non-Normative Collective Action* (cara-cara di luar norma sosial yang umum diterima).

2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Individu dalam *Collective Action*

Collective action tidak muncul spontan, melainkan dipengaruhi kombinasi faktor emosional, kognitif, identitas sosial, dan keyakinan terhadap efektivitas tindakan. Van Zomeren dkk. (2008) mengaitkannya dengan *perceived injustice*, *social identity*, dan *collective efficacy*; Tausch dkk. (2011) mengembangkan *dual pathway model* melalui *emotional pathway* dan *efficacy pathway*; sementara Cervone dkk. (2023) menunjukkan peran kesesuaian tindakan dengan keyakinan (*belief-aligned*) individu terhadap suatu isu.

- 1) Kesesuaian tindakan dengan keyakinan (*Belief Alignment*). Cervone dkk. (2023) menjelaskan bahwa semakin sejalan tindakan dengan keyakinan, nilai, dan posisi individu terhadap suatu isu, semakin tinggi kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam pengembangan *Belief-Aligned Collective Action Scale* (BCA).
- 2) Persepsi ketidakadilan (*Perceived Injustice*). Menurut Van Zomeren dkk. (2008), persepsi ketidakadilan adalah prediktor utama *collective action*; individu yang merasa diri atau kelompoknya diperlakukan tidak adil lebih terdorong bertindak sebagai upaya memperbaiki kondisi tersebut.
- 3) Emosi kelompok (*Group-Based Emotions*). Tausch dkk. (2011) menjelaskan bahwa *anger* atas ketidakadilan kelompok mendorong keinginan berubah; Van Zomeren dkk. (2008) menambahkan bahwa reaksi emosional ini kerap menjadi prediktor lebih kuat dibanding persepsi kognitif atas ketidakadilan itu sendiri.
- 4) Efikasi kelompok (*Collective Efficacy*). Van Zomeren dkk. (2008) menjelaskan bahwa semakin tinggi keyakinan individu terhadap kemampuan kelompok mencapai tujuan yang diperjuangkan, semakin besar kemungkinannya untuk terlibat.
- 5) Identitas sosial (*Social Identity*). Identifikasi kelompok yang kuat meningkatkan motivasi memperjuangkan kepentingan kelompok (Tajfel & Turner, 1979); Van Zomeren dkk. (2008) menemukan individu dengan identifikasi kelompok tinggi lebih mungkin terlibat, menjadikan identitas sosial penghubung kepentingan pribadi dan tujuan kolektif.

- 6) Kemarahan sebagai pendorong *normative action*. Tausch dkk. (2011) menemukan *anger* mendorong *normative collective action* melalui cara-cara legal; Weber (2004) menambahkan bahwa kemarahan bersifat konstruktif karena memperbaiki kesalahan dan memulihkan keadilan.
- 7) Efikasi tinggi sebagai pendorong *normative action*. Tausch dkk. (2011) menjelaskan bahwa efikasi kelompok tinggi mendorong pemilihan tindakan normatif karena keyakinan bahwa perubahan masih dapat dicapai lewat mekanisme legal dan damai.
- 8) *Contempt* sebagai pendorong *non-normative action*. Tausch dkk. (2011) menemukan *contempt* mendorong *non-normative collective action*; Fischer dkk. (2007) menjelaskan *contempt* muncul saat individu tak lagi mengharap rekonsiliasi dan cenderung mengeksklusi lawan secara moral, menjadikannya respons yang lebih kuat dari kemarahan.
- 9) Perasaan tidak berdaya dan rendahnya efikasi. Tausch dkk. (2011) menemukan bahwa rendahnya efikasi kelompok mendorong individu memilih tindakan non-normatif ketika jalur legal dinilai tidak mampu menghasilkan perubahan.
- 10) Keyakinan normatif (*Normative Beliefs*). Klandermans (1997) menjelaskan bahwa keyakinan tentang benar-salah atau adil-tidak adil turut memengaruhi keterlibatan; pelanggaran norma yang bertentangan dengan nilai individu mendorong tindakan untuk memperjuangkan perubahan.
- 11) *Empowerment*. Stürmer dan Simon (2004) menjelaskan bahwa perasaan berdaya dan mampu memengaruhi lingkungan sosial meningkatkan partisipasi individu dalam tindakan kolektif.

2.1.3. Aspek-Aspek *Collective Action*

Cervone dkk. (2023) mengkonseptualisasikan *collective action* sebagai kesediaan individu untuk terlibat dalam tindakan bersama yang sejalan dengan keyakinannya terhadap suatu isu sosial atau politik, berdasarkan pengembangan dari *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA) oleh van Zomeren dkk. (2008) serta model *normative* dan *non-normative collective action* oleh Tausch dkk. (2011). Pengembangan *Belief-Aligned Collective Action Scale* (BCA)

menunjukkan bahwa *collective action* terdiri atas dua dimensi yang merepresentasikan bentuk partisipasi berbeda berdasarkan kesesuaiannya dengan norma sosial yang berlaku, yaitu:

1) *Normative Collective Action*

Kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan kolektif melalui cara-cara yang legal, damai, dan sesuai norma sosial, bertujuan menyampaikan aspirasi, memengaruhi kebijakan, atau mendorong perubahan sosial melalui saluran yang diterima masyarakat dan otoritas. Contohnya menandatangani petisi, mengikuti demonstrasi damai, menghubungi pihak berwenang, membantu penyelenggaraan kegiatan, membagikan informasi atau selebaran, serta memasang poster atau simbol dukungan. Dimensi ini terdiri atas enam item.

2) *Non-Normative Collective Action*

Kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan kolektif yang berada di luar norma sosial yang umum diterima atau melibatkan pelanggaran aturan, biasanya muncul ketika saluran konvensional dinilai tidak efektif menghasilkan perubahan. Contohnya aksi protes ilegal, pemblokiran akses fasilitas tertentu, atau pendudukan bangunan sebagai bentuk tekanan terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Dimensi ini terdiri atas tiga item.

2.1.4 Pengukuran Collective Action (BCA Scale)

Pengukuran *collective action* berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap faktor psikologis yang mendorong keterlibatan individu dalam tindakan bersama. Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mengukur kecenderungan tersebut secara netral terhadap orientasi ideologis adalah *Belief-Aligned Collective Action Scale* (BCA) oleh Cervone dkk., yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan instrumen sebelumnya yang cenderung berfokus pada isu progresif dan sering gagal membedakan individu yang tidak mendukung suatu isu dari individu yang memang tidak berniat terlibat dalam aksi kolektif.

Pengembangan BCA diawali dengan peninjauan berbagai instrumen *collective action* dan *activism* terdahulu, menghasilkan 12 item awal yang diuji melalui

Exploratory Factor Analysis pada sampel Italia dan Inggris. Hasil analisis menunjukkan dua faktor utama, yaitu *Normative Actions* dan *Non-Normative Actions*, namun item 2 dan 8 dikeluarkan karena pola *loading* yang berbeda pada kedua sampel, serta item 3 dihapus berdasarkan hasil *pilot study*, sehingga diperoleh versi final BCA dengan 9 item (6 item *Normative Collective Action* dan 3 item *Non-Normative Collective Action*).

Dimensi *Normative Collective Action* mengukur kesediaan terlibat dalam aksi legal dan sesuai norma sosial, seperti menandatangani petisi, mengikuti demonstrasi, menulis kepada institusi atau media, membantu penyelenggaraan kegiatan, membagikan selebaran, dan memasang poster atau spanduk dukungan. Dimensi *Non-Normative Collective Action* mengukur kesediaan terlibat dalam aksi yang lebih radikal dan berada di luar norma sosial umum, seperti tindakan ilegal dalam protes, memblokir akses area publik, atau menduduki bangunan sebagai bentuk perlawanan. Format respons menggunakan skala *Likert* 7 poin (1 = *not at all* hingga 7 = *very much*), dengan skor lebih tinggi menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk terlibat sesuai keyakinan individu.

Evaluasi psikometrik menunjukkan karakteristik yang baik: *Confirmatory Factor Analysis* pada *Study 2* menghasilkan indeks kesesuaian model yang memadai (CFI = .99; TLI = .99; RMSEA = .05; SRMR = .02), dengan reliabilitas *Cronbach's alpha* sebesar $\alpha = .89$ untuk *Normative Collective Action*, $\alpha = .84$ untuk *Non-Normative Collective Action*, dan $\alpha = .87$ untuk skor total, menegaskan BCA sebagai instrumen yang valid dan reliabel. Dalam penelitian ini, *collective action* diukur menggunakan BCA (Cervone dkk., 2023) karena kemampuannya mengukur kecenderungan partisipasi aksi kolektif secara netral terhadap orientasi ideologis, sehingga sesuai dengan konteks penelitian mengenai keterlibatan individu dalam aksi demonstrasi.

Intelligentia - Dignitas

2.2. Perceived Injustice

2.2.1. Definisi Perceived Injustice

Perceived injustice merupakan penilaian kognitif yang mencakup besarnya kerugian, atribusi kesalahan pada pihak lain, perasaan tidak adil,

dan perasaan bahwa kerugian tidak dapat diperbaiki (Sullivan dkk., 2008). Dalam model SIMCA, konstruk ini dipahami sebagai penilaian subjektif bahwa suatu kelompok diperlakukan tidak adil, yang kemudian memicu reaksi emosional berupa *group-based anger* (van Zomeren dkk., 2008), sekaligus merefleksikan penilaian kognitif negatif terhadap pengalaman ketidakadilan, seperti atribusi kesalahan (*blame*), persepsi *unfairness*, serta penilaian atas keparahan dan sifat kerugian yang tidak dapat diperbaiki (Lynch dkk., 2022).

Konstruk ini banyak dijelaskan melalui perspektif *Just World Beliefs*. Menurut Lerner (1980), *Belief in a Just World* merupakan keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang adil, di mana individu pada akhirnya memperoleh hasil yang sesuai dengan tindakan, usaha, dan moralitasnya (*people get what they deserve and deserve what they get*). Keyakinan ini berfungsi sebagai mekanisme psikologis yang membantu individu memandang kehidupan sebagai sesuatu yang teratur, dapat diprediksi, dan bermakna, serta sering muncul sebagai bentuk *cognitive bias* yang membuat dunia terasa lebih aman meski kenyataannya tidak semua peristiwa bersifat adil (Pilat & Krastev, 2021). Ketika individu mengalami peristiwa yang melanggar hak, norma, atau keyakinannya, asumsi dasar tersebut dapat terguncang dan memunculkan persepsi ketidakadilan yang berdampak pada proses penyesuaian diri dan mekanisme koping. Penelitian ini menggunakan definisi *perceived injustice* dari Neumann dkk. (2021), yang dibangun dari integrasi konsep Sullivan dkk. (2008) dan *Belief in a Just World Theory* Lerner (1980). Sullivan memandang *perceived injustice* sebagai penilaian individu bahwa dirinya mengalami kerugian, perlakuan tidak adil, atau pelanggaran hak, yang sering disertai perasaan kehilangan yang tidak dapat diperbaiki dan kecenderungan menyalahkan pihak lain, sementara Lerner menjelaskan bahwa ketika pengalaman individu bertentangan dengan keyakinan akan dunia yang adil, situasi tersebut dapat dipandang sebagai ketidakadilan. Berdasarkan landasan tersebut, Neumann dkk. (2021) mengkonseptualisasikan *perceived injustice* sebagai persepsi individu bahwa dirinya telah mengalami perlakuan yang salah, tidak adil,

atau melanggar hak-haknya, yang tercermin melalui pengalaman ketidakadilan, persepsi terhadap ketidakadilan, konsekuensi emosional-kognitif, serta respons individu terhadap ketidakadilan yang dialaminya.

2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi *Perceived Injustice*

Perceived injustice dipengaruhi oleh karakteristik individu, pengalaman hidup, proses kognitif, serta lingkungan sosial. Sullivan dkk. (2008) menjelaskan bahwa persepsi ini berkembang dari interaksi antara pengalaman kerugian dan interpretasi subjektif individu; Lerner (1980) mengaitkannya dengan terganggunya *Belief in a Just World*; sementara Neumann dkk. (2021) menekankan peran konteks sosial, politik, dan budaya dalam membentuk pemaknaan tersebut.

- 1) Pengalaman ketidakadilan dan pelanggaran hak. *Perceived injustice* berkembang ketika individu mengalami atau menyaksikan pelanggaran hak, martabat, atau prinsip keadilan, seperti diskriminasi, kekerasan, atau perlakuan tidak setara (Neumann dkk., 2021).
- 2) Keyakinan terhadap dunia yang adil. Persepsi ketidakadilan muncul sebagai konsekuensi terganggunya keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang adil, ketika pengalaman aktual bertentangan dengan harapan individu mengenai keadilan (Lerner, 1980).
- 3) Interpretasi kognitif terhadap kerugian. *Perceived injustice* ditentukan bukan hanya oleh peristiwa yang dialami, tetapi oleh bagaimana individu menginterpretasikan kerugian tersebut sebagai tidak dapat diperbaiki, tidak pantas diterima, atau disebabkan pihak lain (Sullivan dkk., 2008).
- 4) Norma keadilan dan nilai pribadi. Individu dengan standar keadilan yang kuat lebih sensitif terhadap pelanggaran norma dan lebih mudah mengidentifikasi ketidakadilan, sehingga perbedaan nilai antarindividu menghasilkan variasi pemaknaan atas pengalaman yang sama (Faturachman, 2010).
- 5) Perbandingan sosial dan harapan yang tidak terpenuhi. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat muncul ketika hasil yang diterima dinilai lebih rendah dibanding orang lain meski kontribusinya setara, atau ketika harapan atas hasil yang layak tidak terpenuhi (Novitrisani & Hutahaean, 2025).

- 6) Karakteristik kepribadian. Individu yang mudah marah, berempati rendah, dan memiliki regulasi emosi kurang baik lebih rentan memaknai suatu perlakuan sebagai tidak adil dibanding individu dengan pengelolaan emosi yang baik (Faturachman, 2010).
- 7) Struktur sosial dan ketidakadilan sistemik. Ketidakadilan dapat dipertahankan oleh struktur sosial, kebijakan institusional, dan distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga individu dalam lingkungan berketimpangan tinggi lebih berisiko mengembangkan persepsi ketidakadilan (Erck, 2024).
- 8) Bias kognitif dan konstruksi pengetahuan sosial. Stereotip, prasangka, dan bias dalam memproses informasi dapat memperkuat atau membenarkan persepsi ketidakadilan terhadap suatu kelompok, menunjukkan peran cara individu memahami realitas sosial selain pengalaman langsung (Erck, 2024).

2.2.3 Aspek-Aspek *Perceived Injustice*

Neumann dkk. (2021) mengkonseptualisasikan *perceived injustice* sebagai konstruk multidimensional yang menggambarkan bagaimana individu memaknai, mengalami, dan merespons peristiwa yang dianggap tidak adil, dibangun dari integrasi konsep Sullivan dkk. (2008) dan *Belief in a Just World Theory* Lerner (1980). Pengembangan *Perceived Injustice Questionnaire* (PIQ) menunjukkan bahwa *perceived injustice* terdiri atas empat dimensi yang merepresentasikan dampak emosional-kognitif, persepsi, pengalaman, serta respons individu terhadap ketidakadilan, yaitu:

- 1) *Emotional and Cognitive Consequences* (ECC) konsekuensi emosional dan kognitif akibat pengalaman ketidakadilan, seperti kemarahan, kekecewaan, kesedihan, serta pikiran yang terus terfokus pada peristiwa tersebut, yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan cara individu memandang diri maupun lingkungannya.
- 2) *Injustice Perception* (IP) penilaian individu terhadap keberadaan ketidakadilan dalam situasi yang dihadapi, yaitu pandangan bahwa dirinya, kelompoknya, atau orang lain diperlakukan tidak adil, tidak setara, atau

tidak memperoleh hak yang semestinya, berfokus pada interpretasi individu atas suatu peristiwa sebagai bentuk ketidakadilan.

- 3) *Injustice Experience* (IE) pengalaman langsung individu terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil, seperti diskriminasi, pengabaian hak, atau perlakuan sewenang-wenang, yang menekankan keterlibatan pribadi individu dalam peristiwa ketidakadilan yang dialami.
- 4) *Revenge and Forgiveness* (RF) respons individu terhadap ketidakadilan yang dialami, khususnya kecenderungan untuk membalas (*revenge*) atau memaafkan (*forgiveness*), yang dapat berupa keinginan meminta pertanggungjawaban dan membalas perlakuan yang diterima, atau sebaliknya memilih memaafkan dan menerima situasi yang terjadi.

2.2.4 Pengukuran *Perceived Injustice* (PIQ)

Pengukuran *perceived injustice* pada awalnya banyak dikembangkan dalam konteks nyeri kronis, rehabilitasi, dan pengalaman traumatis, sementara instrumen yang dirancang khusus untuk individu yang mengalami kekerasan, perang, dan konflik bersenjata masih relatif terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Neumann dkk. (2021) mengembangkan *Perceived Injustice Questionnaire* (PIQ) berdasarkan kajian literatur, wawancara mendalam, dan *focus group discussions* dengan penyintas perang dan pengungsi dari berbagai wilayah konflik, serta konsultasi dengan ahli psikotraumatologi, hukum, dan pekerjaan sosial.

Proses pengembangan PIQ menghasilkan seperangkat item yang direduksi dan dievaluasi melalui *Principal Component Analysis* (PCA), menghasilkan empat dimensi utama, yaitu *Emotional and Cognitive Consequences* (ECC), *Injustice Perception* (IP), *Injustice Experience* (IE), dan *Revenge and Forgiveness* (RF) (Neumann dkk., 2021). Versi final PIQ terdiri atas 24 item, mencakup 19 item utama (ECC 6 item, IP 5 item, IE 3 item, RF 4 item, serta 1 item lain dalam struktur inti) dan 5 *additional items* yang mengeksplorasi strategi *coping*, harapan terhadap keadilan, serta kebutuhan individu dalam menghadapi pengalaman ketidakadilan. Format respons PIQ menggunakan skala *Likert* lima poin (1 = *Strongly Agree* hingga 5 = *Strongly Disagree*) (Neumann dkk., 2021). Skor tiap dimensi diperoleh dari rata-rata item pada dimensi tersebut, dengan skor keseluruhan (*overall score*)

berasal dari rata-rata skor keempat dimensi dan *additional scale* yang telah ditransformasikan melalui *reverse scoring*; semakin rendah skor keseluruhan, semakin tinggi tingkat *perceived injustice* yang dirasakan.

Evaluasi psikometrik PIQ menunjukkan hasil memuaskan, dengan struktur empat faktor menjelaskan 69,78% total varians dan reliabilitas *Cronbach's alpha* sebesar $\alpha = 0,883$ (ECC), $\alpha = 0,895$ (IP), $\alpha = 0,710$ (IE), $\alpha = 0,800$ (RF), serta $\alpha = 0,929$ secara keseluruhan (Neumann dkk., 2021), menegaskan konsistensi internal PIQ yang memadai sebagai alat ukur persepsi ketidakadilan pada individu dengan pengalaman traumatis akibat konflik dan kekerasan.

Dalam penelitian ini, *perceived injustice* diukur menggunakan PIQ (Neumann dkk., 2021) karena kesesuaiannya dengan konteks penelitian yang berfokus pada persepsi ketidakadilan sebagai respons psikologis terhadap kondisi sosial tertentu, serta validitas konstruk dan reliabilitasnya yang baik untuk mengukur tingkat *perceived injustice* secara komprehensif melalui dimensi pengalaman, persepsi, konsekuensi emosional-kognitif, dan respons individu terhadap ketidakadilan yang dialaminya.

2.3. Social Identity Model of Collective Action (SIMCA)

2.3.1. Definisi Social Identity Model of Collective Action (SIMCA)

Social Identity Model of Collective Action (SIMCA) merupakan model integratif dalam psikologi sosial yang menjelaskan keterlibatan individu dalam *collective action* melalui tiga faktor utama, yaitu *perceived injustice*, *group efficacy*, dan *social identity* (van Zomeren et al., 2008). Model ini dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif sebelumnya yang cenderung terpisah dalam menjelaskan aksi kolektif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak.

Dalam model ini, *perceived injustice* berperan sebagai pemicu utama yang menimbulkan respons emosional, seperti kemarahan terhadap kondisi yang dianggap tidak adil. *Group efficacy* merujuk pada keyakinan individu bahwa tindakan kolektif yang dilakukan bersama kelompok dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan, sedangkan *social identity*

menggambarkan sejauh mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok. Identifikasi tersebut selanjutnya memengaruhi cara individu memaknai ketidakadilan serta keyakinan terhadap kemampuan kelompok dalam mencapai perubahan (van Zomeren et al., 2008). Dengan demikian, SIMCA menekankan bahwa partisipasi dalam *collective action* merupakan hasil interaksi antara faktor emosional, kognitif, dan identitas sosial.

2.3.2. Perkembangan dan Konsep Utama SIMCA

SIMCA dikembangkan melalui pendekatan *meta-analysis* yang mengintegrasikan temuan empiris mengenai faktor psikologis dalam *collective action*, khususnya ketidakadilan subjektif, efikasi, dan identitas sosial, ke dalam satu kerangka teoritis yang terintegrasi (van Zomeren dkk., 2008). Hasil pengembangan model menunjukkan bahwa *perceived injustice*, *group efficacy*, dan *social identity* memiliki pengaruh signifikan dan saling melengkapi dalam menjelaskan keterlibatan individu dalam aksi kolektif, dengan *social identity* berperan sentral sebagai penghubung antara *perceived injustice* dan *group efficacy* tidak hanya memotivasi individu untuk bertindak secara langsung, tetapi juga membentuk cara individu merasakan ketidakadilan dan menilai kemampuan kelompoknya untuk mencapai perubahan (van Zomeren dkk., 2008).

SIMCA juga menekankan bahwa dimensi emosional dari ketidakadilan (*affective injustice*), seperti kemarahan, berpengaruh lebih kuat terhadap *collective action* dibanding sekadar penilaian kognitif, dan bahwa identitas sosial yang terpolitisasi (*politicized identity*) turut berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan, sehingga ketiga faktor tersebut memiliki kontribusi unik namun saling berinteraksi dalam sistem yang terintegrasi (van Zomeren dkk., 2008). Validitas SIMCA diperkuat oleh berbagai penelitian empiris lintas konteks sosial: Nguyen dkk. (2021) menunjukkan bahwa *politicized identity* dan *group-based anger* secara signifikan memprediksi niat terlibat dalam *collective action* sekaligus memediasi hubungan antara *moral conviction* dan partisipasi aksi kolektif, sementara Chan (2017) dalam konteks gerakan pro-demokrasi di Hong

Kong menemukan bahwa identitas sosial, kemarahan, dan efikasi kelompok merupakan prediktor signifikan terhadap niat partisipasi dalam aksi protes.

Temuan-temuan tersebut memperkuat asumsi utama SIMCA bahwa keterlibatan dalam *collective action* dipengaruhi oleh interaksi antara identitas sosial, emosi kolektif, dan efikasi kelompok, serta menegaskan relevansi model ini di berbagai konteks sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, SIMCA menjadi landasan teoritis untuk menjelaskan bagaimana *perceived injustice* dapat mendorong mahasiswa terlibat dalam *collective action*, khususnya dalam bentuk demonstrasi.

2.4. Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi

Mahasiswa umumnya berada pada tahap perkembangan dewasa awal, masa ketika individu mulai membangun kemandirian, tanggung jawab, serta peran sosial yang lebih kompleks. Paputungan (2023), merujuk pada Hurlock (1980), menandai masa ini dengan karakteristik seperti masa pengaturan hidup, masa produktif, serta masa penuh ketegangan emosi dan perubahan nilai, di mana nilai-nilai individu terus disesuaikan seiring meluasnya pengalaman dan interaksi sosial agar dapat diterima dalam kelompok sosialnya. Karakteristik ini berkaitan dengan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang diharapkan aktif memengaruhi pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik, yang didukung oleh tingkat kesadaran politik meliputi pengetahuan, sikap, identitas, dan keterampilan politik (Sunarso dkk., 2024), serta budaya demokrasi yang dipahaminya sebagai warga negara (Fei & Ding, 2021). Sikap politik mahasiswa bersifat dinamis, dibentuk oleh sosialisasi politik dari keluarga, lingkungan sosial, dan pengalaman individu (Hayat dkk., 2024), dan penelitian menunjukkan mahasiswa memiliki minat serta keterlibatan politik yang cukup tinggi, ditandai ketertarikan pada isu sosial dan keyakinan bahwa partisipasi politik penting untuk mendorong perubahan (Hayat dkk., 2024), menjadikannya aktor sosial dengan potensi besar mendorong *collective action*, termasuk dalam bentuk aksi demonstrasi.

Keterlibatan mahasiswa dalam aksi demonstrasi juga tidak terlepas dari bagaimana mereka memaknai ketidakadilan di lingkungan sosial maupun politik. Ketika mahasiswa mempersepsikan adanya ketidakadilan, baik berupa kebijakan

publik, ketimpangan sosial, maupun perlakuan yang merugikan kelompok tertentu, respons emosional seperti kemarahan, kekecewaan, atau ketidakpuasan dapat muncul dan mendorong individu untuk bertindak, bukan sekadar diam (van Zomeren dkk., 2008). Dalam kerangka *dual pathway model*, dorongan ini bekerja melalui *emotional pathway*, yaitu respons emosional terhadap ketidakadilan yang dirasakan kuat, serta *efficacy pathway*, yaitu keyakinan bahwa tindakan kolektif bersama orang lain akan efektif mencapai perubahan (Tausch dkk., 2011; van Zomeren dkk., 2004). Dengan demikian, demonstrasi dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari *collective action*, tempat mahasiswa menyalurkan respons emosional terhadap ketidakadilan sekaligus mengekspresikan tuntutan perubahan secara bersama-sama.

2.5. Aksi Demonstrasi

2.5.1. Definisi Aksi Demonstrasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan demonstrasi sebagai pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, sementara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mendefinisikannya sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, maupun bentuk demonstratif lainnya di muka umum, dengan hak yang dijamin konstitusi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan definisi tersebut, demonstrasi memiliki tiga unsur, yaitu dilakukan secara kolektif, berlangsung di ruang publik, dan ditujukan untuk menuntut perubahan atas kondisi yang dinilai tidak adil. Dalam penelitian ini, aksi demonstrasi dimaknai sebagai keikutsertaan langsung seseorang dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara berkelompok.

2.5.2. Bentuk - bentuk Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kriteria utama, yaitu berdasarkan pelaku/latar belakang massa dan berdasarkan cara pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang massa (Giugni & Grasso, 2019, dalam Indriyanto, 2023):

- 1) Unjuk rasa mahasiswa aksi yang didahului kajian untuk menyoroti persoalan tertentu; kekuatannya terletak pada manajemen isu dan propaganda media, bukan semata jumlah peserta.
- 2) Unjuk rasa buruh, petani, atau profesional umumnya didorong oleh isu atau kebijakan yang secara langsung merugikan kepentingan komunal profesi mereka.
- 3) Unjuk rasa gabungan (buruh, tani, mahasiswa) dapat berlangsung masif dan efektif apabila dikelola secara optimal.
- 4) Unjuk rasa bayaran aksi berdasarkan kesepakatan dengan pihak tertentu yang berkepentingan, dapat melibatkan berbagai elemen massa.

Berdasarkan cara pelaksanaannya:

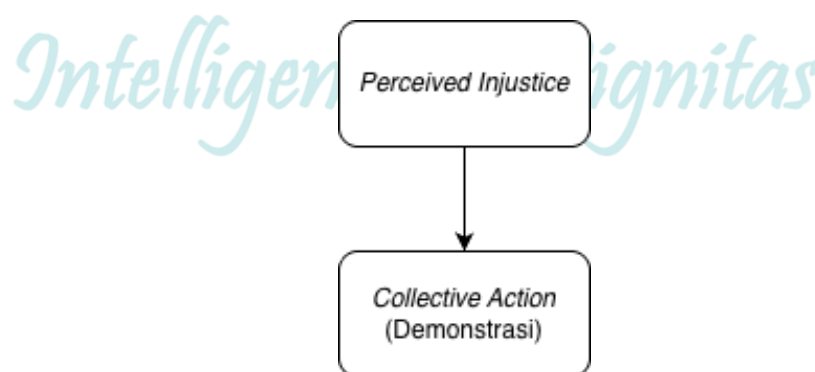
- 1) Demonstrasi damai bertujuan menyosialisasikan aspirasi kepada masyarakat luas, massa relatif terkendali meski menghadapi pemicu potensial.
- 2) Demonstrasi anarkis aksi yang disertai kekerasan, perusakan, atau pelanggaran hukum, umumnya dipicu oleh provokasi, kekecewaan yang terakumulasi, atau ketidakprofesionalan aparat (Indriyanto, 2023).

2.6. Dinamika Variabel

Dinamika hubungan kedua variabel dapat dijelaskan sebagai berikut. Perceived injustice terbentuk ketika mahasiswa mengalami atau menyaksikan peristiwa yang dipandang melanggar hak, merugikan, atau bertentangan dengan prinsip keadilan yang diyakininya (Neumann et al., 2021). Penilaian tersebut mencakup besarnya kerugian yang dialami, kecenderungan menyalahkan pihak lain, perasaan diperlakukan tidak adil, serta perasaan bahwa kerugian tidak dapat diperbaiki (Sullivan et al., 2008). Sejalan dengan perspektif Belief in a Just World, pengalaman yang bertentangan dengan keyakinan bahwa dunia merupakan tempat yang adil akan mengguncang asumsi dasar individu dan memunculkan persepsi ketidakadilan (Lerner, 1980). Pada mahasiswa dengan tingkat perceived injustice yang tinggi, penilaian tersebut memicu reaksi emosional berupa group-based anger,

yaitu kemarahan yang muncul karena kelompoknya dipandang diperlakukan secara tidak adil (van Zomeren et al., 2008). Dalam kerangka dual pathway model, dorongan untuk bertindak kemudian bekerja melalui dua jalur, yaitu jalur emosional berupa kemarahan terhadap ketidakadilan serta jalur efikasi berupa keyakinan bahwa tindakan bersama mampu menghasilkan perubahan yang diinginkan (Tausch et al., 2011). Individu yang mengidentifikasi dirinya secara kuat dengan kelompok yang dirugikan juga semakin terdorong untuk terlibat dalam tindakan kolektif guna memperbaiki kondisi yang ada (Kelly & Breinlinger, 1995). Dorongan-dorongan inilah yang meningkatkan kesediaan mahasiswa untuk terlibat dalam collective action, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan bahwa penilaian ketidakadilan meningkatkan kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif (Szołstakowski & Besta, 2023) dan bahwa persepsi ketidakadilan berhubungan positif dengan berbagai bentuk collective action pada studi lintas negara (Corcoran et al., 2015). Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat perceived injustice yang rendah cenderung memandang kondisi sosial yang ada sebagai sesuatu yang wajar atau masih dapat diterima, sehingga reaksi emosional dan dorongan untuk bertindak tidak terbentuk secara memadai; hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keterlibatan dalam tindakan kolektif tidak terjadi secara otomatis, melainkan bergantung pada proses penilaian psikologis individu terhadap situasi sosial yang dihadapinya (Agostini & van Zomeren, 2021). Dengan demikian, semakin tinggi perceived injustice yang dirasakan mahasiswa, semakin tinggi pula kecenderungan keterlibatannya dalam collective action, dan sebaliknya.

2.7. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bahwa *perceived injustice* menjadi faktor utama pendorong keterlibatan individu dalam *collective action*. Persepsi ketidakadilan memunculkan respons emosional seperti kemarahan (*emotional pathway*) serta keyakinan bahwa tindakan bersama dapat menghasilkan perubahan (*efficacy pathway*), yang bersama-sama meningkatkan kecenderungan individu terlibat dalam *collective action*, baik *normative* maupun *non-normative action*, salah satunya melalui aksi demonstrasi sebagai sarana menyuarakan tuntutan atas ketidakadilan.

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh antara *perceived injustice* dan *collective action* pada mahasiswa. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat *perceived injustice* yang dirasakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan mahasiswa untuk terlibat dalam *collective action*.

2.9. Hasil Penelitian Relevan

- 1) Peneliti: Martijn van Zomeren, Russell Spears, Agneta H. Fischer, dan Colin Wayne Leach

Tahun: 2004

Judul: "*Put Your Money Where Your Mouth Is! Explaining Collective Action Tendencies Through Group-Based Anger and Group Efficacy*"

Jurnal: *Journal of Personality and Social Psychology*

Hasil: Melalui tiga studi eksperimen yang memanipulasi keadilan prosedural, dukungan emosional, dan dukungan instrumental, penelitian ini menemukan bahwa *group-based anger* dan *group efficacy* merupakan prediktor utama keterlibatan dalam *collective action*, sehingga mendukung model *dual pathway* dalam menjelaskan aksi kolektif.

- 2) Peneliti: Nicole Tausch, Julia C. Becker, Russell Spears, Oliver Christ, Rim Saab, Purnima Singh, dan Roomana N. Siddiqui

Tahun: 2011

Judul: *"Explaining Radical Group Behavior: Developing Emotion and Efficacy Routes to Normative and Nonnormative Collective Action"*

Jurnal: *Journal of Personality and Social Psychology*

Hasil: Melalui beberapa studi survei pada konteks protes mahasiswa dan kelompok minoritas, penelitian ini menemukan bahwa *anger* berhubungan kuat dengan *normative action* sedangkan *contempt* lebih berperan mendorong *non-normative action*; efikasi kelompok berhubungan positif dengan *normative action* dan negatif dengan *non-normative action*.

3) Peneliti: Damian Szóstakowski dan Tomasz Besta

Tahun: 2023

Judul: *"Perceived Threat, Injustice Appraisal and Willingness to Join Progressive Collective Action"*

Jurnal: *Current Psychology*

Hasil: Melalui empat studi dalam konteks gerakan hak perempuan dan LGBT, penelitian ini menemukan bahwa *injustice appraisal* berperan sebagai mediator antara persepsi ancaman kelompok (*perceived threat*) dan keterlibatan dalam *collective action*, di mana semakin tinggi persepsi ketidakadilan, semakin tinggi pula kecenderungan individu berpartisipasi.

4) Peneliti: Daniela Renger, Silke Eschert, Mimke L. Teichgräber, dan Sophus Renger

Tahun: 2020

Judul: *"Internalized Equality and Protest Against Injustice: The Role of Disadvantaged Group Members' Self-Respect in Collective Action Tendencies"*

Jurnal: *European Journal of Social Psychology*

Hasil: Melalui tiga studi pada konteks diskriminasi terhadap Muslim dan ketidaksetaraan gender, penelitian ini menemukan bahwa *self-respect* meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam *normative action*, namun tidak berhubungan dengan dukungan terhadap aksi *non-normative*.

5) Peneliti: Katie E. Corcoran, David Pettinicchio, dan Jacob T. N. Young

Tahun: 2015

Judul: *"Perceptions of Structural Injustice and Efficacy: Participation in Low/Moderate/High-Cost Forms of Collective Action"*

Jurnal: *Sociological Inquiry*

Hasil: Menggunakan data lintas negara, penelitian ini menemukan bahwa persepsi ketidakadilan struktural berhubungan positif dengan berbagai bentuk *collective action*, dan efikasi berperan penting meningkatkan partisipasi, terutama ketika individu secara bersamaan memersepsikan adanya ketidakadilan struktural.



Intelligentia - Dignitas